PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
SEKRETARIAT DAERAH
Alamat : Jl. Lawu No. 385 B KaranganyarTelepon (0271) 495039 Faks.123 Faks. (0271) 495590
Website : www.karanganyarkab.go.id E-mail : setda@karanganyarkab.go.id Kode Pos 57712

PENGUMUMAN

NOMOR : 800/3.583.23

TENTANG

PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS)
PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN ANGGARAN 2024

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 293 Tahun 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Tahun Anggaran 2024, maka Pemerintah Kabupaten Karanganyar akan melaksanakan Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil. Pemerintah Kabupaten Karanganyar akan membuka kesempatan bagi Putra/Putri terbaik yang berminat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), dengan ketentuan sebagai berikut:

I. FORMASI JABATAN YANG DIBUTUHKAN:
   1. Jumlah alokasi sebanyak 181 (seratus delapan puluh satu) formasi dengan rincian sebagai berikut:
      a. CPNS Tenaga Kesehatan : 18 Formasi
      b. CPNS Tenaga Teknis : 163 Formasi
   2. Rincian formasi jabatan dan unit kerja penempatan sebagaimana tersebut pada Lampiran I (Lampiran CCLXIV Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 293 Tahun 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Tahun Anggaran 2024) Surat pengumuman ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Pengumuman ini.

II. DASAR HUKUM
   1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
   2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
   3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
   4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 293 Tahun 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Tahun Anggaran 2024.
   5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 320 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024;
   6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 321 Tahun 2024 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024;

7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 322 Tahun 2023 tentang Persyaratan Surat Tanda Registrasi Untuk Melamar Pada Jabatan Fungsional Kesehatan Dalam Pengadaan Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2024;
8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 344 Tahun 2024 tentang Penggunaan Nilai Seleksi Kompetensi Dasar Tahun Anggaran 2023 Dalam Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024.
9. Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi Dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024.

Ketentuan tersebut di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pengumuman ini. Seluruh peserta **WAJIB MEMBACA** dan **MEMPEDOMANI** ketentuan dalam aturan dimaksud. Adapun ketentuan dan/atau aturan khusus selama tidak bertentangan dengan ketentuan tersebut di atas akan diatur lebih lanjut dalam pengumuman ini dan hanya berlaku pada Penerimaan CPNS Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024.

III. PERSYARATAN UMUM

1. Warga Negara Indonesia;
2. Usia pelamar :
   a. Usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun pada saat pendaftaran;
   b. Usia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat pendaftaran;
   c. Batas usia paling tinggi 40 (empat puluh tahun) untuk jabatan sebagai berikut :
      - Dokter dan dokter gigi dengan kualifikasi pendidikan dokter spesialis dan dokter gigi spesialis;
      - Jabatan dokter pendidik klinis;
      - Jabatan dosen, peneliti, perekayasa dengan kualifikasi Pendidikan doktor.

   Yang dibuktikan berdasarkan tanggal kelahiran yang tercantum pada ijazah yang digunakan saat pelamaran;
3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
5. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Dalam hal PPPK melamar pada lowongan jenis pengadaan PNS atau pengadaan PPPK, yang bersangkutan wajib memenuhi Masa Perjanjian Kerja minimal 1 (satu) tahun dan telah mendapatkan persetujuan dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atau Pejabat yang Berwenang (Pyb);
7. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
8. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
9. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga yang berwenang untuk jabatan yang dipersyaratkan;
10. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
11. Tidak pernah mengkonsumsi atau menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya;
12. Berkelakuan baik;

13. Pelamar yang sudah dinyatakan lulus seleksi pengadaan CPNS harus membuat surat pernyataan bersedia mengabdi pada Instansi Pemerintah yang bersangkutan saat melamar dan tidak mengajukan pindah ke instansi lain dengan alasan pribadi paling singkat selama 10 (sepuluh) tahun sejak diangkat sebagai PNS.

IV. KETENTUAN DAN PERSYARATAN PELAMAR

Selain memenuhi persyaratan umum diatas, pelamar wajib memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagai berikut:

1. Ketentuan pelamar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Formasi Tahun 2024 mengacu pada ketentuan sebagai berikut :
    1) Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 320 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024;
    2) Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 322 Tahun 2023 tentang Persyaratan Surat Tanda Registrasi Untuk Melamar Pada Jabatan Fungsional Kesehatan Dalam Pengadaan Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2024;
    3) Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi Dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024.
2. Bagi pelamar penyandang disabilitas dapat melamar pada formasi yang tersedia, dengan ketentuan sebagai berikut:
    1) Surat keterangan dari Dokter Rumah Sakit/Pusat Kesehatan Masyarakat milik Pemerintah yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya; dan
    2) Video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar.
3. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal **3,00** dengan ketentuan;
    1) Untuk ijazah Sarjana/S-1 yang merupakan lanjutan dari Diploma, maka IPK yang dipergunakan adalah IPK Sarjana/S-1;
    2) Untuk jabatan profesi (Dokter, Apoteker dan Ners), IPK yang digunakan adalah IPK Profesi.
4. Tinggi badan untuk formasi Polisi Pamong Praja minimal 160 cm untuk pria dan 155 cm untuk wanita yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Rumah Sakit Pemerintah.

V. TATA CARA PENDAFTARAN

Tata cara pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pelamar dapat melakukan pendaftaran secara daring/*online* dengan alamat https://sscasn.bkn.go.id;
2. Pelamar diwajibkan membaca dengan cermat petunjuk pendaftaran secara daring/*online* dan mencermati setiap keterangan/instruksi/pemberitahuan/peringatan yang muncul di halaman halaman pendaftaran daring/*online* tersebut;
3. Pelamar wajib memiliki akun surat elektronik/*email* yang masih aktif/berlaku;
4. Pelamar wajib mempersiapkan NIK (Nomor Induk Kependudukan), Nomor Kartu Keluarga, dan NIK Kepala Keluarga yang tercantum pada Kartu Keluarga Pelamar;
5. Apabila Pelamar tidak bisa mendaftar terkait data NIK dan Nomor Kartu Keluarga Pelamar, silahkan menghubungi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai alamat pada e-KTP pelamar;

6. Pendaftaran pada laman https://sscasn.bkn.go.id dilakukan dalam 2 (dua) tahap yaitu:
   a. Daftar Akun, pelamar diharuskan untuk:
      1) Mengakses laman https://sscasn.bkn.go.id;
      2) Membuat akun SSCASN BKN;
      3) Login ke akun SSCASN BKN yang telah dibuat; dan
      4) Melengkapi biodata serta unggah swafoto dengan memperlihatkan e-KTP/ Surat Keterangan Perekaman Data Kependudukan dan Kartu Informasi Akun untuk dapat melanjutkan ke tahap berikutnya;
   b. Daftar Formasi, pelamar diharuskan untuk:
      1) Memilih jenis seleksi;
      2) Memilih formasi;
      3) Melengkapi data;
      4) Unggah dokumen persyaratan;
      5) Cek resume dan bila data sudah benar akhiri pendaftaran; dan
      6) Cetak dan Simpan Kartu Informasi Akun dan Kartu Pendaftaran Akun sebagai bukti bahwa Pelamar berhasil melakukan pendaftaran;
   c. Calon Pelamar wajib memperhatikan jenis dan ukuran file masing-masing dokumen yang akan diupload sesuai dengan ketentuan/petunjuk pada laman portal SSCASN BKN.
   d. Dokumen persyaratan yang diunggah/*upload* saat pendaftaran, antara lain:
      1) Scan berwarna Surat Lamaran, dengan ketentuan :
         a) Diketik menggunakan komputer;
         b) Ditujukan kepada Bupati Karanganyar di Karanganyar;
         c) Harus menunjukkan jenis seleksi, jenis formasi dan lokasi penempatan;
         d) Bermaterai elektronik Rp. 10.000,- dengan menggunakan e-materai;
         e) Ditandatangani dengan pena bertinta hitam;
         f) Format file pdf;

         Contoh Surat Lamaran sebagaimana tersebut pada Lampiran II Pengumuman ini;
      2) Pasfoto berwarna terbaru berlatar belakang MERAH, dengan ketentuan sebagai berikut:
         a) Berpakaian rapi;
         b) Rasio 3:4;
         c) Tampak depan;
         d) Posisi *portrait*;

         Format file jpeg/jpg;
      3) *Scan* berwarna Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli atau Surat Keterangan Perekaman Data Kependudukan asli, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan format file jpeg/jpg;
      4) *Scan* berwarna Surat Pernyataan 5 (lima) poin, dengan ketentuan:
         a) Diketik menggunakan komputer;
         b) Bermaterai elektronik Rp. 10.000,-;
         c) Ditandatangani dengan pena bertinta hitam;
         d) Format file pdf;

         Contoh Surat Pernyataan 5 (lima) poin sebagaimana tersebut pada Lampiran III Pengumuman ini;
      5) *Scan* berwarna ijazah asli (sesuai formasi jabatan yang dilamar), dengan format file pdf.
         a) bagi pelamar formasi dokter, apoteker dan perawat wajib mengunggah ijazah S-1 dan profesi;

b) bagi pelamar dengan kualifikasi pendidikan S1 lanjutan dari Diploma wajib mengunggah ijazah Diploma dan S-1;

6) *Scan* berwarna transkrip nilai akademik asli, dengan format file pdf.
   a) bagi pelamar formasi dokter, apoteker dan perawat wajib mengunggah transkrip S-1 dan profesi;
   b) bagi pelamar dengan kualifikasi pendidikan S1 lanjutan dari Diploma wajib mengunggah transkrip Diploma dan S-1;
7) Scan berwarna bukti akreditasi perguruan tinggi dan/atau program studi pada saat kelulusan, dengan format file pdf;
8) Dokumen persyaratan tambahan:
   a) Bagi pelamar Formasi Tenaga Kesehatan yang mensyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR) :
      Scan berwarna asli Surat Tanda Registrasi (STR) bukan internship sesuai Jabatan yang dilamar (Ketentuan dapat dilihat pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 322 Tahun 2023 tentang Persyaratan Surat Tanda Registrasi Untuk Melamar Pada Jabatan Fungsional Kesehatan Dalam Pengadaan Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2024).
   b) Bagi pelamar Formasi Tenaga Teknis :
      Scan berwarna asli Sertifikat Keahlian dan Sertifikat Kompetensi dengan format file pdf untuk Jabatan yang mempersyaratkan.

VI JADWAL DAN TAHAPAN SELEKSI

1. Jadwal pelaksanaan seleksi penerimaan CPNS tahun 2024 adalah sebagai berikut:

NO	KEGIATAN	JADWAL
1	2	3
1)	Pengumuman Seleksi	19 Agustus s.d. 2 September 2024
2)	Pendaftaran Seleksi	20 Agustus s.d. 6 September 2024
3)	Seleksi Administrasi	20 Agustus s.d. 13 September 2024
4)	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	14 s.d. 17 September 2024
5)	Konfirmasi Penggunaan Nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS Tahun Anggaran 2023 oleh Peserta Seleksi	18 s.d. 28 September 2024
6)	Masa Sanggah	18 s.d. 20 September 2024
7)	Jawab Sanggah	18 s.d. 22 September 2024
8)	Pengumuman Pasca Masa Sanggah	21 s.d. 27 September 2024
9)	Penarikan data final SKD CPNS	29 September s.d. 1 Oktober 2024
10)	Penjadwalan SKD CPNS	2 s.d. 8 Oktober 2024
11)	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat SKD CPNS	9 s.d. 15 Oktober 2024
12)	Pelaksanaan SKD CPNS	16 Oktober s.d. 14 November 2024
13)	Pengolahan Nilai SKD CPNS	23 Oktober s.d. 16 November 2024

14)	Pengumuman Hasil SKD CPNS	17 s.d. 19 November 2024
15)	Pelaksanaan SKB CPNS Non-CAT	20 November s.d. 17 Desember 2024
16)	Pemetaan Titik Lokasi Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CPNS dengan CAT	20 s.d. 22 November 2024
17)	Pemilihan Titik Lokasi SKB CPNS dengan CAT oleh Peserta Seleksi	23 s.d. 25 November 2024
18)	Penarikan data final SKB CPNS	26 s.d. 28 November 2024
19)	Penjadwalan SKB CPNS dengan CAT	29 November s.d. 3 Desember 2024
20)	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat SKB CPNS dengan CAT	4 s.d. 8 Desember 2024
21)	Pelaksanaan SKB CPNS	9 s.d. 20 Desember 2024
22)	Integrasi Nilai SKD dan SKB CPNS	17 Desember 2024 s.d. 4 Januari 2025
23)	Pengumuman Hasil CPNS	5 s.d. 12 Januari 2025
24)	Masa Sanggah	13 s.d. 15 Januari 2025
25)	Jawab Sanggah	13 s.d. 19 Januari 2025
26)	Pengolahan Seleksi Hasil Sanggah	15 s.d. 20 Januari 2025
27)	Pengumuman Pasca Sanggah	16 s.d. 22 Januari 2025
28)	Pengisian DRH NIP CPNS	23 Januari s.d. 21 Februari 2025
29)	Usul Penetapan NIP CPNS	22 Februari s.d. 23 Maret 2025

2. Tahapan Seleksi pengadaan CPNS formasi tahun 2024 meliputi:
   1) Seleksi Administrasi;
   2) Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) menggunakan sistem *Computer Assisted Test (CAT)* dari Badan Kepegawaian Negara, yang terdiri dari:
      a) Tes Wawasan Kebangsaan (TWK);
      b) Tes Intelegensia Umum (TIU);dan
      c) Tes Karakteristik Pribadi (TKP)

      Ketentuan Nilai ambang batas dapat dilihat di Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 321 Tahun 2024 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024;
   3) Penggunaan Nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Tahun Anggaran 2023 dalam Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024 dan Konfirmasi Penggunaan Nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS Tahun Anggaran 2023 oleh Peserta Seleksi, sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 344 Tahun 2024 tentang Penggunaan Nilai Seleksi Kompetensi Dasar Tahun Anggaran 2023.
   4) Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) menggunakan sistem *Computer Assisted Test (CAT)* dari Badan Kepegawaian Negara
3. Pengumuman dan jadwal Seleksi Kompetensi dapat dilihat di situs *online* https://sscasn.bkn.go.id atau http://bkpsdm.karanganyarkab.go.id;

VII LAIN-LAIN

1. Jika peserta yang dinyatakan lulus pada saat melengkapi persyaratan administrasi terbukti ditemukan adanya pemalsuan dokumen, akan dikenai sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku serta secara otomatis dianggap gugur dan rangking berikutnya dinyatakan sebagai pengganti;
2. Pelamar wajib mengikuti perkembangan informasi yang ada di http://bkpsdm.karanganyarkab.go.id/ apabila terdapat perubahan sewaktu-waktu maka yang dipakai adalah informasi terakhir;
3. Seluruh tahapan pelaksanaan seleksi **tidak dipungut biaya dalam bentuk apapun** serta keputusan Panitia Seleksi Instansi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2024 bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat;
4. Kepada masyarakat agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain;
5. Pemerintah Kabupaten Karanganyar tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun dari oknum yang mengatasnamakan Panitia Seleksi Instansi Pengadaan CPNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2024, sehingga peserta diharapkan tidak melayani penawaran untuk mempermudah penerimaan sebagai CPNS Tahun 2024; dan
6. Informasi lebih lengkap mengenai rincian formasi dan syarat pendaftaran CPNS Tahun 2024 dapat dilihat melalui portal atau situs https://sscasn.bkn.go.id/ dan https://bkpsdm.karanganyarkab.go.id/ serta dapat menghubungi *Helpdesk* CPNS Tahun 2024 melalui *Whatsapp Chat* dengan nomor **082245094932** atau nomor telepon 0271-495194 pada hari dan jam kerja.

Demikian pengumuman ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di : Karanganyar
Tanggal : 19 Agustus 2024

a.n. BUPATI KARANGANYAR
Pj. SEKRETARIS DAERAH
selaku
Ketua Panitia Seleksi Instansi

ZULFIKAR HADIDH, S.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 19750311 199903 1 009

LAMPIRAN CCLXIV
KEPUTUSAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 293 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI
NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN ANGGARAN 2024

RINCIAN PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KAB. KARANGANYAR TAHUN ANGGARAN 2024

NO	JABATAN	ALOKASI CPNS	UNIT PENEMPATAN
A .	TENAGA KESEHATAN	18	
1.	ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI PERTAMA	2	PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR | DINAS KESEHATAN | BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT
2.	ASISTEN APOTEKER TERAMPIL	3	PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH | BIDANG PENUNJANG MEDIK DAN NON MEDIK
3.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS UROLOGI	1	PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH | BIDANG PELAYANAN MEDIK DAN KEPERAWATAN
4.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	1	PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH | BIDANG PELAYANAN MEDIK DAN KEPERAWATAN
5.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	1	PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR | DINAS KESEHATAN | UPT PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT JATIYOSO
6.	EPIDEMIOLOG KESEHATAN TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR | DINAS KESEHATAN | UPT LABORATORIUM KESEHATAN
7.	NUTRISIONIS TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR | DINAS KESEHATAN | UPT PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT JENAWI
8.	NUTRISIONIS TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR | DINAS KESEHATAN | UPT PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT JATIYOSO
9.	PEMBIMBING KESEHATAN KERJA AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH | BAGIAN TATA USAHA PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH | SUB BAGIAN HUKUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT
10.	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR | DINAS KESEHATAN | UPT PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT COLOMADU II
11.	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL	2	PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR | DINAS KESEHATAN | UPT LABORATORIUM KESEHATAN
12.	TEKNISI TRANSFUSI DARAH TERAMPIL	2	PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH | BIDANG PENUNJANG MEDIK DAN NON MEDIK
13.	TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR | DINAS KESEHATAN | UPT PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KARANGANYAR

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI CPNS	UNIT PENEMPATAN
B .	TENAGA TEKNIS		163	
1.	ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF AHLI PERTAMA	D-IV BISNIS DIGITAL PARIWISATA ; S-1 PARIWISATA ; D-IV BAHASA INGGRIS UNTUK INDUSTRI PARIWISATA ; S-1 ILMU KOMUNIKASI	2	PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA | BIDANG PENGEMBANGAN PARIWISATA
2.	ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | BAGIAN HUKUM
3.	ANALIS KETAHANAN PANGAN AHLI PERTAMA	S-1 AGRIBISNIS ; S-1 ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN ; S-1 ILMU PANGAN ; S-1 KEAMANAN PANGAN ; S-1 KEBIJAKAN PANGAN ; S-1 SAINS PANGAN ; S-1 MANAJEMEN MUTU PANGAN ; S-1 TEKNOLOGI PANGAN	1	PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR | DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN | BIDANG KETAHANAN PANGAN
4.	ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI ; S-1 AKUNTANSI ; D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN ; S-1 MANAJEMEN PAJAK	1	PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR | BADAN KEUANGAN DAERAH | BIDANG ANGGARAN | SUB BIDANG PENGENDALIAN ANGGARAN
5.	ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI PERTAMA	S-1 AKUNTANSI ; S-1 EKONOMI ; D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN ; S-1 MANAJEMEN PAJAK	1	PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR | BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | SEKRETARIAT | SUB BAGIAN UMUM
6.	ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI ; S-1 AKUNTANSI ; D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN ; S-1 MANAJEMEN PAJAK	1	PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR | BADAN KEUANGAN DAERAH | BIDANG PERBENDAHARAAN DAN KAS DAERAH | SUB BIDANG KAS DAERAH
7.	ANALIS PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK ; S-1 PSIKOLOGI	1	PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | BIDANG INFORMASI DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
8.	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	S-1 ADMINISTRASI NEGARA ; S-1 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK ; S-1 MANAJEMEN	1	PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | SEKRETARIAT
9.	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	S-1 ADMINISTRASI NEGARA ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 MANAJEMEN ; D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH ; D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK	1	PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN ADMINISTRASI UMUM | BAGIAN ORGANISASI
10.	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	S-1 ADMINISTRASI NEGARA ; S-1 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH ; D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 MANAJEMEN	1	PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR | DINAS KESEHATAN | SEKRETARIAT | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
11.	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III KEARSIPAN ; D-III ILMU INFORMASI PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN ; D-III KESEKRETARIATAN	1	PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR | BADAN KEUANGAN DAERAH | SEKRETARIAT | SUB BAGIAN UMUM
12.	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III ILMU INFORMASI PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN ; D-III KEARSIPAN ; D-III KESEKRETARIATAN	1	PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR | KECAMATAN KERJO | SEKRETARIAT
13.	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III KEARSIPAN ; D-III ILMU INFORMASI PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN ; D-III KESEKRETARIATAN	1	PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH | BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN | SUB BAGIAN TATA USAHA DAN KEPEGAWAIAN
14.	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III KEARSIPAN ; D-III ILMU INFORMASI PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN ; D-III KESEKRETARIATAN	1	PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR | KECAMATAN JATIPURO | SEKRETARIAT
15.	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III KEARSIPAN ; D-III ILMU INFORMASI PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN ; D-III KESEKRETARIATAN	1	PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN ADMINISTRASI UMUM | BAGIAN UMUM
16.	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III ILMU INFORMASI PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN ; D-III KEARSIPAN	1	PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | BIDANG KEARSIPAN
17.	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III ILMU INFORMASI PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN ; D-III KEARSIPAN ; D-III KESEKRETARIATAN	1	PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR | KECAMATAN JENAWI | SEKRETARIAT
18.	ASESOR SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK ; S-1 PSIKOLOGI	1	PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | BIDANG INFORMASI DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
19.	AUDITOR AHLI PERTAMA	S-1 ADMINISTRASI BISNIS ; S-1 ADMINISTRASI NEGARA ; S-1 HUKUM ; S-1 ILMU POLITIK	2	PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR | INSPEKTORAT DAERAH | INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS
20.	AUDITOR AHLI PERTAMA	S-1 AKUNTANSI ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 ADMINISTRASI BISNIS ; S-1 ILMU POLITIK ; S-1 HUKUM ; D-IV AKUNTANSI	2	PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR | INSPEKTORAT DAERAH | INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH III BIDANG PEREKONOMIAN, PEMBANGUNAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
21.	JURU OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR	D-III TEKNIK ARSITEKTUR ; D-III TEKNIK GEODESI ; D-III TEKNIK GEOLOGI ; D-III TEKNIK PENGAIRAN ; D-III TEKNIK SIPIL ; D-III TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR ; D-III TEKNOLOGI KONSTRUKSI BANGUNAN AIR	1	PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT | UPT PEMELIHARAAN JALAN, JEMBATAN DAN IRIGASI JUMAPOLO
22.	JURU OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR	D-III TEKNIK ARSITEKTUR ; D-III TEKNIK GEODESI ; D-III TEKNIK GEOMATIKA ; D-III TEKNIK PENGAIRAN ; D-III TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR ; D-III TEKNOLOGI KONSTRUKSI BANGUNAN AIR ; D-III TEKNIK SIPIL ; D-III TEKNIK GEOLOGI	1	PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT | UPT PEMELIHARAAN JALAN, JEMBATAN DAN IRIGASI KARANGPANDAN
23.	JURU OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR	D-III TEKNIK ARSITEKTUR ; D-III TEKNIK GEOLOGI ; D-III TEKNIK GEOMATIKA ; D-III TEKNIK PENGAIRAN ; D-III TEKNOLOGI	1	PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT | UPT PEMELIHARAAN JALAN,

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI CPNS	UNIT PENEMPATAN
		KONSTRUKSI BANGUNAN AIR ; D-III TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA ; D-III TEKNIK SIPIL ; D-III TEKNIK GEODESI		JEMBATAN DAN IRIGASI JATIPURO
24.	JURU OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR	D-III TEKNIK ARSITEKTUR ; D-III TEKNIK GEODESI ; D-III TEKNIK GEOLOGI ; D-III TEKNIK PENGAIRAN ; D-III TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR ; D-III TEKNOLOGI KONSTRUKSI BANGUNAN AIR ; D-III TEKNIK GEOMATIKA ; D-III TEKNIK SIPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT | UPT PEMELIHARAAN JALAN, JEMBATAN DAN IRIGASI KEBAKKRAMAT
25.	JURU OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR	D-III TEKNIK ARSITEKTUR ; D-III TEKNIK GEODESI ; D-III TEKNIK GEOLOGI ; D-III TEKNIK GEOMATIKA ; D-III TEKNIK PENGAIRAN ; D-III TEKNOLOGI KONSTRUKSI BANGUNAN AIR ; D-III TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR ; D-III TEKNIK SIPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT | UPT PEMELIHARAAN JALAN, JEMBATAN DAN IRIGASI COLOMADU
26.	JURU OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR	D-III TEKNIK ARSITEKTUR ; D-III TEKNIK GEODESI ; D-III TEKNIK GEOLOGI ; D-III TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR ; D-III TEKNIK PENGAIRAN ; D-III TEKNOLOGI KONSTRUKSI BANGUNAN AIR ; D-III TEKNIK GEOMATIKA ; D-III TEKNIK SIPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT | UPT PEMELIHARAAN JALAN, JEMBATAN DAN IRIGASI JENAWI
27.	JURU OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR	D-III TEKNIK ARSITEKTUR ; D-III TEKNIK GEOMATIKA ; D-III TEKNIK GEOLOGI ; D-III TEKNIK SIPIL ; D-III TEKNIK PENGAIRAN ; D-III TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR ; D-III TEKNOLOGI KONSTRUKSI BANGUNAN AIR ; D-III TEKNIK GEODESI	1	PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT | UPT PEMELIHARAAN JALAN, JEMBATAN DAN IRIGASI KERJO
28.	JURU OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR	D-III TEKNIK ARSITEKTUR ; D-III TEKNIK SIPIL ; D-III TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR ; D-III TEKNIK GEOLOGI ; D-III TEKNIK GEOMATIKA ; D-III TEKNIK PENGAIRAN ; D-III TEKNOLOGI KONSTRUKSI BANGUNAN AIR	1	PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT | UPT PEMELIHARAAN JALAN, JEMBATAN DAN IRIGASI JATIYOSO
29.	JURU OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR	D-III TEKNIK ARSITEKTUR ; D-III TEKNIK GEODESI ; D-III TEKNIK GEOMATIKA ; D-III TEKNIK GEOLOGI ; D-III TEKNIK PENGAIRAN ; D-III TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR ; D-III TEKNOLOGI KONSTRUKSI BANGUNAN AIR ; D-III TEKNIK SIPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT | UPT PEMELIHARAAN JALAN, JEMBATAN DAN IRIGASI TAWANGMANGU
30.	MANGGALA INFORMATIKA AHLI PERTAMA	D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI ; D-IV REKAYASA KEAMANAN SIBER ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA JARINGAN ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK ; S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 INFORMATIKA ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 TEKNIK KOMPUTER ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER JARINGAN	5	PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | BIDANG TATAKELOLA INFORMATIKA
31.	MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL AHLI PERTAMA	D-IV RELASI INDUSTRI ; S-1 ADMINISTRASI BISNIS ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT ; S-1 HUKUM ; S-1 SOSIOLOGI ; S-1 ILMU KOMUNIKASI	1	PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR | DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA | BIDANG TENAGA KERJA
32.	OPERATOR SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TERAMPIL	D-III SISTEM INFORMASI ; D-III TEKNOLOGI INFORMASI ; D-III TEKNOLOGI KOMPUTER	1	PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK
33.	OPERATOR SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TERAMPIL	D-III SISTEM INFORMASI ; D-III TEKNOLOGI INFORMASI ; D-III TEKNOLOGI KOMPUTER	1	PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL
34.	PAMONG BUDAYA AHLI PERTAMA	S-1 ARKEOLOGI ; S-1 SOSIOLOGI ; S-1 SEJARAH ; S-1 SEJARAH KEBUDAYAAN ISLAM ; S-1 TATA KELOLA SENI ; S-1 KRIYA SENI ; S-1 ANTROPOLOGI	2	PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | BIDANG KEBUDAYAAN
35.	PARAMEDIK VETERINER TERAMPIL	D-III KESEHATAN HEWAN ; D-III KESEHATAN TERNAK ; D-III PARAMEDIK VETERINER ; D-III TEKNISI MEDIS VETERINER	1	PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR | DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN | BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
36.	PEKERJA SOSIAL AHLI PERTAMA	D-IV PEKERJAAN SOSIAL ; S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL	3	PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR | DINAS SOSIAL | BIDANG PEMBERDAYAAN DAN PEMBINAAN SOSIAL
37.	PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN AHLI PERTAMA	D-IV JASA KONSTRUKSI ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA GEOMETIKA DAN SURVEI ; S-1 TEKNIK GEODESI DAN GEOMATIKA ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI JALAN DAN JEMBATAN ; D-IV MANAJEMEN PROYEK KONSTRUKSI ; S-1 TEKNIK SIPIL ; S-1 TEKNIK GEOLOGI ; S-1 TEKNIK LINGKUNGAN ; S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA ; S-1 TEKNIK ARSITEKTUR	1	PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT | BIDANG BINA MARGA
38.	PENATA KELOLA PENANAMAN MODAL AHLI PERTAMA	S-1 AKUNTANSI ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 HUKUM ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 ADMINISTRASI BISNIS ; D-IV MANAJEMEN AGRIBISNIS ; S-1 AGRIBISNIS ; S-1 BISNIS DIGITAL	4	PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | KOORDINATOR PENANAMAN MODAL
39.	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 ILMU INFORMATIKA ; S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 TEKNIK KOMPUTER ; S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER ; S-1 SISTEM INFORMASI	1	PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR | BADAN KEUANGAN DAERAH | SEKRETARIAT | SUB BAGIAN UMUM
40.	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 ILMU INFORMATIKA ; S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER ; S-1 TEKNIK KOMPUTER	1	PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | SEKRETARIAT | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
41.	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 ILMU INFORMATIKA ; S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER ; S-1 TEKNIK KOMPUTER ; S-1 SISTEM INFORMASI	1	PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | BAGIAN PEMERINTAHAN
42.	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 ILMU INFORMATIKA ; S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 TEKNIK KOMPUTER ;	1	PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI CPNS	UNIT PENEMPATAN
		S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER		SUMBER DAYA MANUSIA | SEKRETARIAT | SUB BAGIAN UMUM
43.	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 ILMU INFORMATIKA ; S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER ; S-1 TEKNIK KOMPUTER ; S-1 SISTEM INFORMASI	1	PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | SEKRETARIAT | SUB BAGIAN UMUM
44.	PENATA LAKSANA BARANG TERAMPIL	D-III AKUNTANSI ; D-III MANAJEMEN ASET ; D-III MANAJEMEN KEUANGAN ; D-III MANAJEMEN PAJAK ; D-III PERBANKAN DAN KEUANGAN ; D-III SISTEM INFORMASI AKUNTANSI	1	PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR | BADAN KEUANGAN DAERAH | SEKRETARIAT | SUB BAGIAN UMUM
45.	PENATA LAKSANA BARANG TERAMPIL	D-III AKUNTANSI ; D-III MANAJEMEN ASET ; D-III MANAJEMEN KEUANGAN ; D-III MANAJEMEN PAJAK ; D-III PERBANKAN DAN KEUANGAN ; D-III SISTEM INFORMASI AKUNTANSI	1	PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | SEKRETARIAT | SUB BAGIAN UMUM
46.	PENATA LAKSANA BARANG TERAMPIL	D-III AKUNTANSI ; D-III MANAJEMEN ASET ; D-III MANAJEMEN KEUANGAN ; D-III MANAJEMEN PAJAK ; D-III PERBANKAN DAN KEUANGAN ; D-III SISTEM INFORMASI AKUNTANSI	1	PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | SEKRETARIAT | SUB BAGIAN UMUM
47.	PENATA LAKSANA BARANG TERAMPIL	D-III AKUNTANSI ; D-III MANAJEMEN ASET ; D-III MANAJEMEN KEUANGAN ; D-III MANAJEMEN PAJAK ; D-III PERBANKAN DAN KEUANGAN ; D-III SISTEM INFORMASI AKUNTANSI	1	PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN ADMINISTRASI UMUM | BAGIAN UMUM | SUB BAGIAN RUMAH TANGGA DAN PERLENGKAPAN
48.	PENATA LAKSANA BARANG TERAMPIL	D-III AKUNTANSI ; D-III MANAJEMEN ASET ; D-III MANAJEMEN KEUANGAN ; D-III MANAJEMEN PAJAK ; D-III PERBANKAN DAN KEUANGAN ; D-III SISTEM INFORMASI AKUNTANSI	1	PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR | DINAS KESEHATAN | SEKRETARIAT | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
49.	PENATA LAKSANA BARANG TERAMPIL	D-III AKUNTANSI ; D-III MANAJEMEN ASET ; D-III MANAJEMEN KEUANGAN ; D-III MANAJEMEN PAJAK ; D-III PERBANKAN DAN KEUANGAN ; D-III SISTEM INFORMASI AKUNTANSI	1	PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT | SEKRETARIAT | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
50.	PENATA LAKSANA BARANG TERAMPIL	D-III AKUNTANSI ; D-III MANAJEMEN ASET ; D-III MANAJEMEN KEUANGAN ; D-III MANAJEMEN PAJAK ; D-III PERBANKAN DAN KEUANGAN ; D-III SISTEM INFORMASI AKUNTANSI	1	PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR | BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | SEKRETARIAT | SUB BAGIAN UMUM
51.	PENATA LAKSANA BARANG TERAMPIL	D-III AKUNTANSI ; D-III MANAJEMEN ASET ; D-III MANAJEMEN KEUANGAN ; D-III MANAJEMEN PAJAK ; D-III PERBANKAN DAN KEUANGAN ; D-III SISTEM INFORMASI AKUNTANSI	1	PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | SEKRETARIAT | SUB BAGIAN UMUM
52.	PENATA LAKSANA BARANG TERAMPIL	D-III AKUNTANSI ; D-III MANAJEMEN ASET ; D-III MANAJEMEN KEUANGAN ; D-III MANAJEMEN PAJAK ; D-III PERBANKAN DAN KEUANGAN ; D-III SISTEM INFORMASI AKUNTANSI	1	PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | SEKRETARIAT | SUB BAGIAN UMUM
53.	PENATA LAKSANA BARANG TERAMPIL	D-III AKUNTANSI ; D-III MANAJEMEN ASET ; D-III MANAJEMEN KEUANGAN ; D-III MANAJEMEN PAJAK ; D-III PERBANKAN DAN KEUANGAN ; D-III SISTEM INFORMASI AKUNTANSI	1	PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | SEKRETARIAT | SUB BAGIAN UMUM
54.	PENATA LAKSANA BARANG TERAMPIL	D-III AKUNTANSI ; D-III MANAJEMEN ASET ; D-III MANAJEMEN KEUANGAN ; D-III MANAJEMEN PAJAK ; D-III PERBANKAN DAN KEUANGAN ; D-III SISTEM INFORMASI AKUNTANSI	1	PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH | BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN | SUB BAGIAN RUMAH TANGGA
55.	PENATA LAKSANA BARANG TERAMPIL	D-III AKUNTANSI ; D-III MANAJEMEN ASET ; D-III MANAJEMEN KEUANGAN ; D-III MANAJEMEN PAJAK ; D-III PERBANKAN DAN KEUANGAN ; D-III SISTEM INFORMASI AKUNTANSI	1	PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR | DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA | SEKRETARIAT | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
56.	PENATA LAKSANA BARANG TERAMPIL	D-III AKUNTANSI ; D-III MANAJEMEN ASET ; D-III MANAJEMEN KEUANGAN ; D-III MANAJEMEN PAJAK ; D-III PERBANKAN DAN KEUANGAN ; D-III SISTEM INFORMASI AKUNTANSI	1	PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR | DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN | SEKRETARIAT | SUB BAGIAN UMUM
57.	PENATA LAKSANA BARANG TERAMPIL	D-III AKUNTANSI ; D-III MANAJEMEN ASET ; D-III MANAJEMEN KEUANGAN ; D-III MANAJEMEN PAJAK ; D-III PERBANKAN DAN KEUANGAN ; D-III SISTEM INFORMASI AKUNTANSI	1	PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR | DINAS PERHUBUNGAN | SEKRETARIAT | SUB BAGIAN UMUM
58.	PENATA LAKSANA BARANG TERAMPIL	D-III AKUNTANSI ; D-III MANAJEMEN ASET ; D-III MANAJEMEN KEUANGAN ; D-III MANAJEMEN PAJAK ; D-III PERBANKAN DAN KEUANGAN ; D-III SISTEM INFORMASI AKUNTANSI	1	PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | SEKRETARIAT | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
59.	PENATA PERIZINAN AHLI PERTAMA	D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH ; S-1 EKONOMI ; S-1 HUKUM ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 TEKNIK INDUSTRI	4	PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | KOORDINATOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
60.	PENERA AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK FISIKA ; S-1 STATISTIKA ; S-1 TEKNIK INSTRUMENTASI DAN AUTOMASI ; S-1 MATEMATIKA ; S-1 TEKNIK INDUSTRI	1	PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR | DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA | BIDANG PERDAGANGAN
61.	PENGANTAR KERJA AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN AGRIBISNIS ; S-1 AGRIBISNIS ; S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL ; S-1 HUKUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR | DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA | BIDANG TENAGA KERJA
62.	PENGAWAS JARINGAN UTILITAS	D-IV ARSITEKTUR ; D-IV TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL DAN ARSITEKTUR ; S-1 TEKNIK SIPIL ; S-1 TEKNIK GEODESI DAN GEOMATIKA ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA GEOMETIKA DAN SURVEI ; S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA ; S-1 TEKNIK ARSITEKTUR ; S-1 TEKNIK SISTEM ENERGI ; S-1 TEKNIK SUMBER DAYA AIR	1	PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT | BIDANG BINA MARGA
63.	PENGAWAS KOPERASI AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI KOPERASI ; S-1 MANAJEMEN ; D-IV AKUNTANSI BISNIS DIGITAL ; S-1 EKONOMI ; S-1 USAHA KOPERASI	1	PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | BIDANG KOPERASI
64.	PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP AHLI PERTAMA	S-1 GEOGRAFI ; S-1 ILMU GEOGRAFI ; S-1 TEKNIK GEOLOGI ; S-1 TEKNIK INDUSTRI ; S-1 TEKNIK KIMIA	1	PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | BIDANG PENATAAN DAN PENAATAN PPLH
65.	PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH AHLI	D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 ILMU POLITIK ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 EKONOMI ; S-1 HUKUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR | INSPEKTORAT DAERAH | INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH I BIDANG

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI CPNS	UNIT PENEMPATAN
	PERTAMA			PEMERINTAHAN, HUKUM, APARATUR DAN REFORMASI BIROKRASI
66.	PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH AHLI PERTAMA	D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 EKONOMI ; S-1 HUKUM ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN	1	PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR | INSPEKTORAT DAERAH | INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH II BIDANG PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
67.	PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH AHLI PERTAMA	S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH ; S-1 HUKUM ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 EKONOMI	1	PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR | INSPEKTORAT DAERAH | INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH IV BIDANG KESEHATAN, PENDIDIKAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
68.	PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH AHLI PERTAMA	D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 EKONOMI ; S-1 HUKUM ; S-1 TEKNIK LINGKUNGAN	1	PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR | INSPEKTORAT DAERAH | INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH III BIDANG PEREKONOMIAN, PEMBANGUNAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
69.	PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH AHLI PERTAMA	D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 HUKUM ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 EKONOMI	1	PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR | INSPEKTORAT DAERAH | INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS
70.	PENGELOLA KEPROTOKOLAN	D-III ADMINISTRASI NEGARA ; D-III MANAJEMEN ; D-III ADMINISTRASI PUBLIK	3	PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN ADMINISTRASI UMUM | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | SUB BAGIAN PROTOKOL
71.	PENGELOLA KESEHATAN IKAN AHLI PERTAMA	S-1 BUDIDAYA PERAIRAN ; S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN ; S-1 BUDIDAYA PERIKANAN ; S-1 TEKNOLOGI DAN MANAJEMEN PERIKANAN BUDIDAYA	1	PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR | DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN | BIDANG PERIKANAN
72.	PENGELOLA LAYANAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	D-III ANALISIS LINGKUNGAN ; D-III BUDIDAYA PERIKANAN ; D-III BUDIDAYA PERAIRAN ; D-III KELAUTAN ; D-III PEMBENIHAN IKAN ; D-III PERIKANAN ; D-III TEKENOLOGI BUDIDAYA PERIKANAN ; D-III TEKNOLOGI PEMANFAATAN SUMBER DAYA KELAUTAN	2	PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR | DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN | BIDANG PERIKANAN
73.	PENGELOLA LAYANAN KESEHATAN	D-III ANALIS KESEHATAN ; D-III FARMASI ; D-III FISIOTERAPI ; D-III GIZI ; D-III KEBIDANAN ; D-III KEPERAWATAN ; D-III KESEHATAN GIGI ; D-III KESEHATAN LINGKUNGAN ; D-III ORTOTIK DAN PROSTETIK ; D-III REFRAKSI OPTISI ; D-III TEKNIK RADIODIAGNOSTIK DAN RADIOTERAPI ; D-III TERAPI OKUPASI ; D-III TERAPI WICARA	5	PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH | BIDANG PENUNJANG MEDIK DAN NON MEDIK
74.	PENGELOLA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN ; D-III ADMINISTRASI PUBLIK ; D-III HUBUNGAN MASYARAKAT ; D-III MANAJEMEN ; D-III PARALEGAL ; D-III PEMBANGUNAN SOSIAL ; D-III SOSIOLOGI PEDESAAN	3	PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
75.	PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA AHLI PERTAMA	S-1 AKUNTANSI ; D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK ; S-1 ADMINISTRASI BISNIS ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 EKONOMI ; S-1 HUKUM ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN	5	PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
76.	PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNOLOGI PENDIDIKAN ; S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	1	PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | BIDANG SEKOLAH DASAR | SEKSI PENGEMBANGAN KURIKULUM DAN PENJAMINAN MUTU SEKOLAH DASAR
77.	PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN AHLI PERTAMA	S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL ; S-1 PENDIDIKAN FISIKA ; S-1 PENDIDIKAN KIMIA ; S-1 TEKNOLOGI PENDIDIKAN ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	1	PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | BIDANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA | SEKSI PENGEMBANGAN KURIKULUM DAN PENJAMINAN MUTU SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
78.	PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK LINGKUNGAN ; S-1 KESEHATAN LINGKUNGAN ; S-1 TEKNIK PENYEHATAN LINGKUNGAN ; S-1 BIOLOGI ; S-1 ILMU LINGKUNGAN	1	PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | BIDANG PENATAAN DAN PENAATAN PPLH
79.	PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR TERAMPIL	D-II PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR	1	PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR | DINAS PERHUBUNGAN | BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN
80.	PENYULUH LINGKUNGAN HIDUP AHLI PERTAMA	S-1 BIOLOGI ; S-1 ILMU LINGKUNGAN ; S-1 KESEJAHTERAAN LINGKUNGAN ; S-1 TEKNIK LINGKUNGAN ; S-1 TEKNIK PENYEHATAN LINGKUNGAN ; S-1 PSIKOLOGI MASYARAKAT	1	PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH DAN PENGEMBANGAN KAPASITAS
81.	PENYULUH SOSIAL AHLI PERTAMA	D-IV PEKERJAAN SOSIAL ; D-IV PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN SOSIAL ; D-IV REHABILITASI SOSIAL ; S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL ; S-1 PEMBANGUNAN SOSIAL ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 BIMBINGAN DAN KONSELING ; S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT ; S-1 HUKUM ; S-1 PSIKOLOGI	3	PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR | DINAS SOSIAL | BIDANG PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL
82.	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 AKUNTANSI ; S-1 EKONOMI ; D-IV AKUNTANSI	1	PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | SEKRETARIAT
83.	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA	1	PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | SEKRETARIAT
84.	PERENCANA AHLI PERTAMA	D-IV AKUNTANSI ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 EKONOMI ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA ; S-1 MANAJEMEN	1	PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR | BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | BIDANG EKONOMI
85.	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 EKONOMI	1	PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR |

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI CPNS	UNIT PENEMPATAN
		PEMBANGUNAN ; S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA ; S-1 AKUNTANSI		BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | BIDANG SOSIAL DAN BUDAYA
86.	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA	1	PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR | BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | BIDANG FISIK DAN PRASARANA
87.	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 AKUNTANSI ; D-IV AKUNTANSI ; S-1 EKONOMI	1	PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | SEKRETARIAT PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
88.	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI MANAJEMEN ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 EKONOMI ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA	1	PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | SEKRETARIAT
89.	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 AKUNTANSI ; S-1 EKONOMI ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 EKONOMI MANAJEMEN ; S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA	1	PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | SEKRETARIAT
90.	PERISALAH LEGISLATIF AHLI PERTAMA	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 HUKUM ; S-1 ILMU KOMUNIKASI ; S-1 EKONOMI ; S-1 SAINS POLITIK	1	PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH | BAGIAN PERSIDANGAN DAN PERUNDANGAN-UNDANGAN
91.	POLISI PAMONG PRAJA TERAMPIL	D-III PARALEGAL ; D-III MANAJEMEN ; D-III HUBUNGAN MASYARAKAT ; D-III PEMBANGUNAN SOSIAL ; D-III ADMINISTRASI PUBLIK ; D-III ENTOMOLOGI PERMUKIMAN	5	PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | BIDANG PENEGAKAN PERATURAN DAERAH
92.	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT TERAMPIL	D-III HUBUNGAN MASYARAKAT ; D-III KOMUNIKASI ; D-III TEKNOLOGI MULTIMEDIA DAN BROADCASTING ; D-III MULTIMEDIA ; D-III DESAIN GRAFIS ; D-III DESAIN KOMUNIKASI VISUAL	2	PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN ADMINISTRASI UMUM | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
93.	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III REKAYASA PERANGKAT LUNAK APLIKASI ; D-III SISTEM INFORMASI ; D-III TEKNIK INFORMATIKA	1	PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR | KECAMATAN JATIPURO | SEKRETARIAT
94.	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III REKAYASA PERANGKAT LUNAK APLIKASI ; D-III SISTEM INFORMASI ; D-III TEKNIK INFORMATIKA	1	PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR | KECAMATAN JUMANTONO | SEKRETARIAT
95.	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III REKAYASA PERANGKAT LUNAK APLIKASI ; D-III SISTEM INFORMASI ; D-III TEKNIK INFORMATIKA	1	PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR | KECAMATAN NGARGOYOSO | SEKRETARIAT
96.	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III SISTEM INFORMASI ; D-III REKAYASA PERANGKAT LUNAK APLIKASI ; D-III TEKNIK INFORMATIKA	1	PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN ADMINISTRASI UMUM | BAGIAN UMUM
97.	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III REKAYASA PERANGKAT LUNAK APLIKASI ; D-III SISTEM INFORMASI ; D-III TEKNIK INFORMATIKA	1	PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | SEKRETARIAT
98.	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III REKAYASA PERANGKAT LUNAK APLIKASI ; D-III SISTEM INFORMASI ; D-III TEKNIK INFORMATIKA	1	PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR | BADAN KEUANGAN DAERAH | SEKRETARIAT | SUB BAGIAN UMUM
99.	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III REKAYASA PERANGKAT LUNAK APLIKASI ; D-III SISTEM INFORMASI ; D-III TEKNIK INFORMATIKA	1	PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR | KECAMATAN MOJOGEDANG | SEKRETARIAT
100.	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III REKAYASA PERANGKAT LUNAK APLIKASI ; D-III SISTEM INFORMASI ; D-III TEKNIK INFORMATIKA	1	PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA | SEKRETARIAT | SUB BAGIAN UMUM
101.	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III REKAYASA PERANGKAT LUNAK APLIKASI ; D-III SISTEM INFORMASI ; D-III TEKNIK INFORMATIKA	1	PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR | KECAMATAN KARANGPANDAN | SEKRETARIAT
102.	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III REKAYASA PERANGKAT LUNAK APLIKASI ; D-III SISTEM INFORMASI ; D-III TEKNIK INFORMATIKA	1	PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR | DINAS KESEHATAN | SEKRETARIAT | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
103.	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III REKAYASA PERANGKAT LUNAK APLIKASI ; D-III SISTEM INFORMASI ; D-III TEKNIK INFORMATIKA	1	PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | SEKRETARIAT | SUB BAGIAN UMUM
104.	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III REKAYASA PERANGKAT LUNAK APLIKASI ; D-III TEKNIK INFORMATIKA ; D-III SISTEM INFORMASI ; D-III SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS ; D-III TEKNOLOGI INFORMASI ; D-III TEKNOLOGI KOMPUTER GRAFIS	1	PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | SEKRETARIAT | SUB BAGIAN UMUM
105.	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III SISTEM INFORMASI ; D-III TEKNIK INFORMATIKA ; D-III REKAYASA PERANGKAT LUNAK APLIKASI	1	PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR | KECAMATAN JATEN | SEKRETARIAT
106.	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III REKAYASA PERANGKAT LUNAK APLIKASI ; D-III SISTEM INFORMASI ; D-III TEKNIK INFORMATIKA	1	PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR | KECAMATAN KEBAKKRAMAT | SEKRETARIAT
107.	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III REKAYASA PERANGKAT LUNAK APLIKASI ; D-III SISTEM INFORMASI ; D-III TEKNIK INFORMATIKA	1	PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | SEKRETARIAT | SUB BAGIAN UMUM
108.	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III REKAYASA PERANGKAT LUNAK APLIKASI ; D-III SISTEM INFORMASI ; D-III TEKNIK INFORMATIKA	1	PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR | KECAMATAN GONDANGREJO | SEKRETARIAT
109.	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III REKAYASA PERANGKAT LUNAK APLIKASI ; D-III SISTEM INFORMASI ; D-III TEKNIK INFORMATIKA	1	PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | BIDANG PENGANGKATAN DAN MUTASI
110.	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III REKAYASA PERANGKAT LUNAK APLIKASI ; D-III SISTEM INFORMASI ; D-III TEKNOLOGI INFORMASI	1	PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | SEKRETARIAT
111.	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III REKAYASA PERANGKAT LUNAK APLIKASI ; D-III SISTEM INFORMASI ; D-III TEKNIK	1	PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR | KECAMATAN TAWANGMANGU |

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI CPNS	UNIT PENEMPATAN
		INFORMATIKA		SEKRETARIAT
112.	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III SISTEM INFORMASI ; D-III TEKNIK INFORMATIKA ; D-III REKAYASA PERANGKAT LUNAK APLIKASI	1	PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH | BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN | SUB BAGIAN TATA USAHA DAN KEPEGAWAIAN
113.	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III REKAYASA PERANGKAT LUNAK APLIKASI ; D-III SISTEM INFORMASI ; D-III TEKNIK INFORMATIKA	1	PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | SEKRETARIAT | SUB BAGIAN UMUM
114.	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III REKAYASA PERANGKAT LUNAK APLIKASI ; D-III SISTEM INFORMASI ; D-III TEKNIK INFORMATIKA	1	PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR | KECAMATAN MATESIH | SEKRETARIAT
115.	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III REKAYASA PERANGKAT LUNAK APLIKASI ; D-III SISTEM INFORMASI ; D-III TEKNIK INFORMATIKA	1	PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR | KECAMATAN KERJO | SEKRETARIAT
116.	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III REKAYASA PERANGKAT LUNAK APLIKASI ; D-III SISTEM INFORMASI ; D-III TEKNIK INFORMATIKA	1	PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | SEKRETARIAT | SUB BAGIAN UMUM
117.	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III TEKNIK INFORMATIKA ; D-III SISTEM INFORMASI ; D-III REKAYASA PERANGKAT LUNAK APLIKASI	1	PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR | KECAMATAN JUMAPOLO | SEKRETARIAT
118.	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III REKAYASA PERANGKAT LUNAK APLIKASI ; D-III TEKNIK INFORMATIKA ; D-III SISTEM INFORMASI	1	PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR | KECAMATAN JATIYOSO | SEKRETARIAT
119.	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III REKAYASA PERANGKAT LUNAK APLIKASI ; D-III SISTEM INFORMASI ; D-III TEKNIK INFORMATIKA	1	PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR | KECAMATAN COLOMADU | SEKRETARIAT
120.	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III REKAYASA PERANGKAT LUNAK APLIKASI ; D-III TEKNIK INFORMATIKA ; D-III SISTEM INFORMASI	1	PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR | DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA | SEKRETARIAT | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
121.	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III REKAYASA PERANGKAT LUNAK APLIKASI ; D-III SISTEM INFORMASI ; D-III TEKNIK INFORMATIKA	1	PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR | BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | SEKRETARIAT | SUB BAGIAN UMUM
122.	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III REKAYASA PERANGKAT LUNAK APLIKASI ; D-III SISTEM INFORMASI ; D-III TEKNIK INFORMATIKA	1	PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR | KECAMATAN KARANGANYAR | SEKRETARIAT
123.	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III REKAYASA PERANGKAT LUNAK APLIKASI ; D-III SISTEM INFORMASI ; D-III TEKNIK INFORMATIKA	1	PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR | KECAMATAN TASIKMADU | SEKRETARIAT
124.	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III REKAYASA PERANGKAT LUNAK APLIKASI ; D-III SISTEM INFORMASI ; D-III TEKNIK INFORMATIKA	1	PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | SEKRETARIAT | SUB BAGIAN UMUM
125.	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III REKAYASA PERANGKAT LUNAK APLIKASI ; D-III SISTEM INFORMASI ; D-III TEKNIK INFORMATIKA	1	PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | SEKRETARIAT | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
126.	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III REKAYASA PERANGKAT LUNAK APLIKASI ; D-III SISTEM INFORMASI ; D-III TEKNIK INFORMATIKA	1	PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR | KECAMATAN JENAWI | SEKRETARIAT
127.	SANDIMAN TERAMPIL	D-III KOMPUTER DAN SISTEM INFORMASI ; D-III REKAYASA PERANGKAT LUNAK APLIKASI ; D-III TEKNIK ELEKTRO/ELEKTRONIKA ; D-III TEKNIK INFORMATIKA ; D-III TEKNIK KOMPUTER ; D-III TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN	1	PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | BIDANG TATAKELOLA INFORMATIKA

LAMPIRAN II
PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : 800/3.583.23

CONTOH SURAT LAMARAN

....., ... 2024

Lampiran : ..... dokumen
Perihal : Penerimaan CPNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2024

Kepada Yth :
BUPATI KARANGANYAR

di - KARANGANYAR

Memperhatikan Pengumuman Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Pemerintah Kabupaten Karanganyar nomor 800/3.583.23 tanggal 19 Agustus 2024, dengan hormat kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Alamat Lengkap :
No. HP/Telp :
Pendidikan :

Bersama ini mengajukan permohonan untuk mengikuti seleksi Penerimaan CPNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2024, untuk jenis jabatan :

Jenis Seleksi :
Formasi :
Nama Jabatan :
Kualifikasi Pendidikan :
Unit Kerja Penempatan :

Sebagai bahan pertimbangan, terlampir kami sampaikan berkas-berkas persyaratan yang kami unggah pada *website* https://sscasn.bkn.go.id.

Demikian untuk menjadikan periksa.

Hormat Kami,

*)

Nama Lengkap

*) Tanda tangan bermeterai elektronik Rp. 10.000,-

LAMPIRAN III
PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : 800/3.583.23

CONTOH SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Tempat dan Tanggal Lahir :

Agama :

Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya :

1. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
2. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Calon PNS atau PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta atau pegawai lainnya antara lain pegawai Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;
3. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
4. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis.
5. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia dituntut di pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Instansi Pemerintah, apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

....., ...2024

Yang membuat pernyataan,

*)

.....

*) Tanda tangan bermeterai elektronik
Rp. 10.000,-